

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Awal perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang memberikan informasi tentang sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan pada awal tahun telah terealisasi selama periode tertentu.

Namun, dalam ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kinerja keuangan mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan telah berhasil mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi keuangan yang dituangkan dalam perencanaan strategisnya. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, hanya melihat angka dalam Laporan Realisasi Anggaran saja belum cukup. Diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami stabilitas dan kesehatan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan adalah menggunakan rasio keuangan. Terdapat beberapa analisis strategi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dikembangkan berdasarkan informasi keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, metode yang umum digunakan adalah dengan memeriksa rasio-rasio seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Selain itu, Analisis Pertumbuhan Realisasi Pendapatan-LRA, Rasio Efektivitas Total Pendapatan, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan rasio lainnya juga menjadi pertimbangan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kesehatan keuangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Suatu daerah yang telah memperoleh kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri adalah Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Solok pada tahun 2004, dengan luas wilayah mencapai 3.346,20 km² berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. Secara administratif, wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di bagian selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten lainnya di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, dan Dharmasraya, dari barat ke timur. Ibukotanya terletak di Padang Aro, sekitar 161 km dari pusat Kota Padang.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menyediakan pelayanan publik

kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan untuk menilai efisiensi dan kekurangan keuangan daerah tersebut pada Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD).

Terkait UU yang mengatur permasalahan ini, terdapat beberapa UU yang relevan yang mengatur tata kelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia, seperti:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: UU ini mengatur mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam hal perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: UU ini memberikan landasan hukum terkait pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi dasar analisis rasio keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks penelitian dan analisis keuangan pemerintah daerah, pemahaman yang mendalam tentang UU, peraturan, PSAK, dan UUD menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu dalam melihat kinerja keuangan pemerintah daerah secara

komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang efektif dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat pentingnya analisa Laporan Realisasi Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan pengkajian dan Observasi lebih mendalam mengenai **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Sebagai Alat Ukur Penilaian Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2022 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yakni **“Bagaimana kinerja pemerintah daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggarannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Menggunakan Rasio Keuangan Pemerintah Tahun 2018 – 2022”?**

1.3 Tujuan Magang

Tujuan penulisan dari kegiatan magang yang dilakukan yaitu agar mengetahui kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan laporan realisasi anggarannya. Dan juga untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Mengelola Anggarannya.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan magang ini diantaranya adalah :

1.4.1 Bagi Penulis

1. Pengalaman Kerja yaitu Menambah pengetahuan, Keterampilan dan wawasan di dunia kerja, seperti berkomunikasi, bekerja dalam tim, manajemen waktu, dan tugas-tugas yang terkait di BPKD Sol-Sel.
2. Menggunakan magang sebagai kesempatan untuk bekerja dan Mendapatkan wawasan praktis tentang bidang Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memutuskan karier yang sesuai dengan minat kedepannya.
3. Memahami bagaimana teori yang pelajari di bangku kuliah diterapkan dalam praktik di dunia nyata.
4. Berkontribusi dan menyumbangkan hasil pemikiran yang didapat untuk menganalisis Kinerja Pemerintahan sebagai karya tulis penelitian tugas akhir.
5. Penulisan berguna sebagai salah satu syarat kelulusan program studi D3 Akuntansi jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

1.4.2 Bagi Instansi

1. Melalui kegiatan magang dapat memberikan peluang kerja sama dengan institusi pendidikan.

2. Karya Tulis atau Tugas Akhir Mahasiswa magang dapat dijadikan sebagai masukan – masukan yang berarti untuk mengevaluasi kinerja terutama realisasi anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Memberikan Peluang Pelatihan kepada mahasiswa magang dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kontribusi terhadap pendidikan.

1.4.3 Bagi Universitas

1. Menghasilkan lulusan terbaik yang berkompeten di bidang ilmu yang ditekuni untuk meningkatkan pendidikan di Universitas.
2. Melalui magang universitas dapat melakukan pengembangan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut.
3. Sebagai pengembangan kurikulum pendidikan di universitas dan menjalin kerja sama antar instansi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini, Penulis melakukan penelitian/Magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan yang beralamatkan Jl. Poros 2 Komplek Perkantoran Pemda Kab. Solok Selatan, Lubuk Gadang, Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat 27778.

Waktu Magang/ Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024 – 15 Maret 2024 atau Selama 40 hari kerja.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis ini, Penulis akan menggunakan metode berikut:

1.6.1 Tinjauan Pustaka

Metode ini akan digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, peraturan pemerintah, dan literatur terkait lainnya. Data teoritis ini akan digunakan sebagai dasar untuk membandingkan dan mengkaji hubungan antara teori dan situasi sebenarnya yang akan dibahas.

1.6.2 Observasi/Pengamatan

Pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi langsung terhadap objek data, termasuk proses, kondisi, kejadian, atau perilaku manusia. Dalam hal ini, peneliti akan mengamati kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menganalisis rasio keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

1.6.3 Partisipasi dalam Praktik Lapangan

Pengumpulan informasi juga akan melibatkan partisipasi aktif dalam praktik lapangan. Ini akan dilakukan dengan cara berkontribusi secara langsung dalam mendapatkan informasi yang diperlukan melalui magang di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada proposal yang diajukan, maka penulis memberikan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir (TA) sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan diuraikan secara ringkas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti. Memaparkan secara teoritis mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan.

Bab III : Gambaran Umum Instansi

Menjelaskan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang berisi profil dan sejarah berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, Serta Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini lebih lanjut menjelaskan penilaian kinerja keuangan pemerintah melalui “Analisis Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Sebagai Alat Ukur Penilaian Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2022 menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah”.

Bab V : Penutup

Pada bagian ini berisikan ringkasan dari hasil penelitian, kesimpulan dan saran yang ditarik dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

